

PEDOMAN

PENGUKURAN KINERJA

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa, Pedoman Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa telah dapat diselesaikan dengan baik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas dilakukan evaluasi kinerja. Dengan mengetahui capaian fisik kegiatan, maka akuntabilitas penggunaan anggaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dari waktu ke waktu seiring dengan penyerapan anggaran. Selain itu untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam upaya meningkatkan kinerja.

Panduan ini antara lain berisi tentang cara penghitungan pencapaian *output/suboutput* kegiatan yang dilengkapi dengan contoh dan pembobotannya, seperti kegiatan yang ada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa, antara lain kegiatan jasa perumusan kebijakan maupun kegiatan pengadaan barang baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penghitungan fisik kegiatan secara periodik dapat selalutersedia.

Tondano, Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MINAHASA,**



DJEFRI SUMENDAP SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640123 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
E. Pengertian Umum.....	3
BAB II. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB III. ASPEK EVALUASI KINERJA	5
A. Kegiatan yang dilakukan sekali selesai (1 –5hari)	7
B. Kegiatan yang dilakukan berproses (durasi lebih dari 1 bulan).....	9
C. Kegiatan yang merupakan kegiatan rutin bulanan	10
D. Kegiatan belanja modal	11
E. Waktu Pengukuran Kinerja	13
BAB IV. PROSESEVALUASI KINERJA	14
A. Persiapan Evaluasi Kinerja	14
B. Pengumpulan Data.....	14
C. Pengukuran.....	15
D. Penilaian.....	22
E. Analisis.....	23
BAB V. PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA	24
BAB VI. DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI	25
BAB VII. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN	26
BAB VIII. PENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Penyusunan Rancangan /DraftPermentan	7
Tabel 2. Penyusunan Pedoman	8
Tabel 3. Rapat Koordinasi/Temukoordinasi	8
Tabel 4. Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop	8
Tabel 5. Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis	8
Tabel 6. Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi	8
Tabel 7. Pengukuran fisik kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Karantina .	9
Tabel 8. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab. Uji Standar KH	9
Tabel 9. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Coba Metode Pemeriksaan Lab. Uji Standar KT	9
Tabel 10. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar Kehati Nabati/Hewani	9
Tabel 11. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KH	10
Tabel 12. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Metode Uji Standar KT	10
Tabel 13. Pengukuran fisik kegiatan Pelaksanaan Uji Terap	10
Tabel 14. Pengukuran fisik kegiatan pembuatan ataupun penyempurnaan aplikasi TI	10
Tabel 15. Rekap capaian fisik perbulan	11
Tabel 16. Pengadaan Barang Non Infrastruktur	11
Tabel 17. Pengadaan Barang Infrastruktur	12
Tabel 18. Rekap Pengisian Matrik Pengukuran perbulan	12
Tabel 19. Rekap capaian realisasi anggaran dan output perbulan	12
Tabel 20. Pengukuran capaian indikator kinerja perbulan	13
Tabel 21. Pengukuran capaian indikator kinerja triwulan	13
Tabel 22. Pengukuran capaian kinerja jangkamengah	13
Tabel 23. Aspek evaluasi, data yang diperlukan dan sumber data	14
Tabel 24. Indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran	15
Tabel 25. Contoh Rencana penarikan dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu eselon I	18
Tabel 26. Perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan	19
Tabel 27. Contoh Suatu eselon I memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi	19
Tabel 28. Perbandingan target dan realisasi volume keluaran dan anggaran	20

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan RAPBD, monitoring dan evaluasi merupakan instrument penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran pemerintah, sebagai umpan balik dan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran di tahun selanjutnya dan sebagai peringatan dini atas capaian kinerja anggaran tahun berjalan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pemenuhan fungsi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada *stakeholders* secara profesional, sekaligus untuk mempelajari faktor yang mendukung dan/atau menjadi kendala dalam pelaksanaan RKA-K/L.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi,

(2) manfaat, dan (3) konteks. Utamanya pada evaluasi implementasi, diukur menggunakan empat indikator, yaitu (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian *output*, dan (4) efisiensi. Dalam operasionalnya, pemanfaat anggaran seringkali menemui kesulitan untuk mengukur perkembangan capaian *output*. Kondisi demikian menyebabkan analisis terhadap capaian implementasi kegiatan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena di satu pihak anggaran terserap, namun tidak disertai dengan laporan capaian *output* fisik.

Salah satu penyebab tidak terlaporkannya perkembangan capaian *output* fisik adalah kesulitan pemanfaat anggaran 'menilai' tingkat capaian *output*, sementara pelaporan capaian *output* menjadi kewajiban seperti diamanatkan dalam PMK 249/2011, yang dilakukan secara bulanan. Untuk mengatasi hal itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa mencoba menyiapkan pedoman pengisian fisik kegiatan. Pedoman ini melengkapi instrumen Sistem Monev, yang telah mengakomodasi instrumen PMK 249/2011, sehingga dimungkinkan setiap pemanfaat APBD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa dapat mengukur capaian *output* terhadap serapan anggarannya. Dengan demikian serapan anggaran dapat dilengkapi dengan capaian *output* fisik.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman pengukuran kinerja untuk menyediakan acuan dalam mengukur capaian *output* fisik bulanan pada kegiatan yang didanai oleh APBD di Satker Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa. Sedangkan tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. Memberikan panduan dalam mengukur perkembangan capaian *output* setiap kegiatan;
2. Memberikan panduan dalam mengendalikan dan memantau perkembangan capaian *output* dalam penggunaan anggaran

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diuraikan dalam pedoman ini adalah :

1. Sistematika Penulisan
2. Aspek Evaluasi Kinerja
3. Persiapan Evaluasi Kinerja
4. Pengumpulan Data
5. Pengukuran
6. Analisis
7. Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja

4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja setiap tahun diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perjanjian Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perjanjian dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Perbup SOTK Dinas Tenaga Kerja
10. Perbup Renstra Dinas Tenaga Kerja

11. Perbup Renja Dinas Tenaga Kerja 2023

5. Pengertian Umum

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja.
2. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
3. Pengukuran Kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.
4. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
5. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
6. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
7. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
8. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
11. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagai perwujudan misi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja yang disusun secara periodik.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Evaluasi sebaiknya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. DESKRIPSI PROGRAM

Berisi tinjauan mengenai tujuan dan sasaran program, termasuk penjelasan mengenai model logika informasi kinerja, yang berisi uraian mengenai hubungan antara permasalahan, hasil, keluaran, kegiatan dan masukan.

BAB II. IDENTIFIKASI DAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Berisi penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi

BAB III. PERSIAPAN EVALUASI

Berisi penjelasan mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan dalam proses evaluasi, termasuk penyusunan desain pengumpulan data

BAB IV. PENGUMPULAN DATA

Berisi penjelasan mengenai jenis data yang dibutuhkan dan mekanisme pengumpulannya.

BAB V. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Berisi mekanisme pengukuran dan penilaian beserta penjelasan mengenai perhitungan aspek-aspek tersebut.

BAB VI. ANALISIS

- a. Berisi penjelasan mengenai hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap aspek
- b. Perbandingan dan penjelasan antara hasil pengukuran dan penilaian periode saat ini dengan periodesebelumnya.

BAB VII. KETERBATASAN DALAM PROSES EVALUASI

Memberikan informasi mengenai kendala dan keterbatasan dalam proses evaluasi.

BAB VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

BAB III

ASPEK EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja terdiri atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, manfaat dan konteks dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Evaluasi aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran dengan indikator yang diukur meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi.
2. Evaluasi aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai, dengan indikator yang diukur merupakan capaian indikator kinerja utama.
3. Evaluasi kinerja aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk kebijakan pemerintah.

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dan evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Aspek evaluasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa mencakup evaluasi terhadap capaian Indikator kegiatan utama sesuai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan penganggaran. Oleh karena itu evaluasi kinerja diharapkan dapat menggambarkan dan mengukur capaian indikator kinerja berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada Renstra tahun 2019 – 2023 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa adalah:

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja
2. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi
3. Tingkat produktivitas tenaga kerja
4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota

Dalam mencapai target pada Indikator kinerja utama tersebut, diselenggarakan kerangka kegiatan besar sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penunjang Unsur Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Stake Holder
2. Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja
5. Meningkatkan Hubungan Industrial

Dari kerangka kegiatan besar tersebut, jenis kegiatan yang perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi meliputi:

1. Kegiatan Kantor Dinas Tenaga Kerja
 - a. Perumusan Kebijakan (Rancangan Peraturan Perundangan, Pedoman, Juklak/Juknis dengan tahapan kegiatan tertentu)
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
 - c. Pemeliharaan asset peralatan mesin dan gedung/bangunan
 - d. Layanan Perkantoran
 - e. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pada dasarnya pengukuran fisik dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu kegiatan yang dilakukan sekali selesai, kegiatan yang dilakukan berproses, kegiatan yang merupakan

kegiatan rutin bulanan, dan kegiatan belanja modal. Adapun pengukuran capaian kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang dilakukan sekali selesai (1 – 5 hari)

Pengukuran capaian kegiatan mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada tabel 1 – 8 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan kegiatan perumusan kebijakan ketenagakerjaan, pengawasan dan penindakan berupa Penyusunan rancangan permetaan dan penyusunan pedoman, Rapat Koordinasi/Temu koordinasi, Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop, Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis, Perjalanan Dinas Monev mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 5.

Tabel 1. Penyusunan Pedoman

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan Penyusunan Pedoman	100	10	10
2.	Penyusunan Pedoman	100	30	40
3.	Pembahasan Pedoman	100	20	60
4.	Uji Konsep Implementasi	100	20	80
5.	Finalisasi Penyusunan Pedoman	100	10	90
6.	Pelaporan	100	10	100

Tabel 2. Rapat Koordinasi/Temu koordinasi

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	50	80
3.	Pelaporan	100	20	100

Tabel 3. Seminar, Sosialisasi, Apresiasi atau Workshop

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	30	30
2.	Pelaksanaan	100	50	80
3.	Pelaporan	100	20	100

Tabel 4. Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	50	70
3.	Pelaporan	100	30	100

Tabel 5. Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	50	70
3.	Pelaporan	100	30	100

B. Kegiatan yang dilakukan berproses (durasi lebih dari 1bulan)

Pengukuran capaian kegiatan mengikuti tahapan dan konsensus pembobotan seperti pada tabel sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

Tabel 6. Pengukuran fisik kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1.	Persiapan	100	20	20
2.	Pelaksanaan	100	70	90
3.	Pelaporan	100	10	100

C. Kegiatan yang merupakan kegiatan rutinbulanan

1. Pengukuran fisik untuk kegiatan yang bersifat rutin bulanan dalam kondisi ideal pengukuran fisik per bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember secara berturut-turut adalah 8.33; 16.67; 25; 33.33; 41.67; 50; 58.33; 66.67; 75;83.33; 91.67 dan 100.
2. Kegiatan bulanan berupa tingkat dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran sebagaimana tabel 15, dengankomponen:
 - a. Gaji danTunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Tabel 7. Rekap capaian fisik perbulan

No	Output/ Suboutput/ Komponen	% progress Capaian Per Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Gaji dan Tunjangan	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100
2.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100

D. Kegiatan belanjamodal

1. Pengukuran Fisik Output Kegiatan Pengadaan Barang danJasa
2. Kegiatan belanja modal dengan pengukuran perkembangan fisiknya sesuai dengan tahapan kegiatan, konsensus pembobotan seperti tabel16.

Tabel 8. Pengadaan Barang Non Infrastruktur

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1	Pembentukan Tim Teknis dan Pokja Pengadaan/ Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa	100	5	5
2	Persiapan (Penyusunan HPS, Spesifikasi Teknis)	100	10	15
3	Penandatanganan Kontrak/Pembayaran Uang Muka	100	25	40
4	Pelaksanaan Kontrak	100	35	75
5	Pemeriksaan Fisik Barang	100	15	90
6	Berita Acara Serah Terima Barang	100	10	100

Tabel 9. Pengadaan Barang Infrastruktur

No.	Tahapan Kegiatan	Target output (%)	Bobot (%)	Nilai Fisik Kumulatif (%)
1	Pembentukan Tim Teknis dan Pokja Pengadaan/Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa	100	5	5
2	Penandatanganan Kontrak Perencanaan	100	10	15
3	Penandatanganan Kontrak Fisik dan Pembayaran Uang Muka	100	25	40
4	Pelaksanaan Kontrak/Pembayaran Termin I	100	35	75
5	Pemeriksaan fisik bangunan	100	15	90
6	Serah terima barang dan jasa	100	10	100

Tabel 10. Rekap Pengisian Matrik Pengukuran per bulan Bulan:

.....

Output/ Sub output dan tahapan kegiatan	Bobot	Anggaran			Output				Penjelasan		
		Pagu (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Progres sd bulan ini (%)	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tabel 11. Rekap capaian realisasi anggaran dan output per bulan

No	Output/ Suboutput/ Komponen	% Progres Capaian Per Bulan																							
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
		Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output	Anggaran	output

BAB IV
PROSES EVALUASI KINERJA

Proses Evaluasi Kinerja berupa tahapan evaluasi; persiapan evaluasi, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, dan rekomendasi. Evaluasi kinerja dilakukan dengan melalui tahap persiapan evaluasi kinerja, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian dan analisis. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan sejak RKA ditetapkan oleh Bupati dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.

A. PERSIAPAN EVALUASIKINERJA

Persiapan evaluasi Kinerja difokuskan untuk memandu mendapatkan data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program. Pada persiapan evaluasi kinerja meliputi:

- a. Mempersiapkan dan membuat model logika informasikinerja
 Memuat gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakatdan/atau pemangku kepentingan. Model logika informasi kinerja didasarkan data dalam dokumen RKA
- b. Inventarisasi dan identifikasi berbagai indikator dan targetkinerja
 Melakukan inventarisasi dan identifikasi apa yang direncanakan atau yang dijanjikan. identifikasi indikator dan terget kinerja didasarkan data dalam dokumen RKA.
- c. Penyusunan desain pengumpulandata
 Desain pengumpulolan data difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama program.

B. PENGUMPULANDATA

Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks seperti pada tabel 1:

Tabel 15 Aspek evaluasi, data yang diperlukan dan sumber data

Aspek Evaluasi	Data yang diperlukan	Sumber data
Aspek Implementasi	Pagu Anggaran	Data RKA-K/L*)
	Target volume keluaran	Data RKA-K/L*)
	Target indikator kinerja keluaran	Data RKA-K/L*)
	Rencana Penarikan dana	Data DIPA*)
	Realisasi anggaran	SP2D*)

	Realisasi volume keluaran	Laporan K/L (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan)**)
	Realisasi indikator kinerja keluaran	Review dokumen, survey, atau FGD***)
Aspek manfaat	Target indikator kinerja utama	Data RKA*)
	Realisasi indikator kinerja utama	Review dokumen, survey, atau FGD***)
Aspek konteks	Data kependudukan, indikator ekonomi, indeks tingkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, politik, arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yangterkait	Review dokumen, survey, atau FGD yang melibatkan pemangku kepentingan

Keterangan:

- *) saat ini jenis data telah tersedia dan input dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi sehingga tidak perlu melakukan input data berulang
- ***) data tersedia di K/L, tetapi belum dapat dipenuhi secara otomatis dalam aplikasi
- ***) saat ini jenis data tersebut belum tersedia dan untuk itu selama masa transisi 2 tahun, aspek ini tidak diukur

C. PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran seperti pada tabel 24.

Tabel 16. Indikator, data yang diperlukan, pengumpulan data dan cara pengukuran

Indikator	Data yang diperlukan	Pengumpulan data	Cara pengukuran
Penyerapan anggaran	Realisasi anggaran (RA)	SP2D*)	$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$
	Pagu anggaran (PA)	Data RKA-*)	
Konsistensi antara perencanaan dan implementasi	Rencana penarikan dana (RPD)	Data DIPA*)	$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j} \right) 100\%}{n}$
	Realisasi anggaran (RA)	SP2D*)	

Pencapaian keluaran	Realisasi volume keluaran (RVK)	Laporan (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang Dapat dipertanggung jawabkan)**)	$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK_{ke\ i}}{TVK_{ke\ i}} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKK_{i\ ke\ j}}{TKK_{i\ ke\ j}}}{m} \right)}{n} \times 100\%$
	Target volume keluaran (TVK)	Data RKA-*)	
	Realisasi indikator kinerja keluaran (RKK)	Review dokumen, survey, atau FGD***)	
	Target indikator kinerja keluaran (TKK)	Data RKA-*)	
Efisiensi	Target volume keluaran (TVK)	Data RKA-*)	$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RKA_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}} \right)}{n} \times$
	Realisasi volume keluaran (RVK)	Laporan (bukti serah terima, surat pernyataan, bukti lain yang Dapat dipertanggung jawabkan)**)	
	Pagu anggaran (PA)	Data RKA-K/L*)	
	Realisasi anggran (RA)	SP2D*)	
Pencapaian Hasil	Realisasi indikator kinerja Utama (RKU)	Review dokumen, survey, atau FGD***)	$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}}}{n} \times$ <p>Pengukuran ini berlaku 2 tahun setelah PMK diundangkan (Pasal 22)</p>
	Target Indikator Kinerja Utama (TKU)	Data RKA-K/L*)	

Keterangan: Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspekmanfaat

Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja

a. Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA: Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja PA:

Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

Contoh: Suatu eselon I memiliki pagu anggaran TA.2011 sebesar Rp 10.000.000.000 dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp 9.500.000.000, maka pengukuran aspek penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$PA = 10.000.000.000$$

$$RA = 9.500.000.000$$

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

$$P = \frac{9.500.000.000}{10.000.000.000} \times 100\% = 95.00\%$$

b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi RA

: Realisasi anggaran seluruh satuannya

RPD : Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja n

: Jumlah bulan

Tabel 17 Contoh Rencana penarikan dana (RPD) bulanan beserta realisasi anggaran dari suatu eselon II

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran
Januari	458.300.000	458.300.000	458.300.000
Februari	458.300.000	916.600.000	916.600.000
Maret	458.300.000	1.374.900.000	1.374.900.000
April	458.300.000	1.833.200.000	1.833.200.000
Mei	458.300.000	2.291.500.000	2.291.500.000
Juni	458.300.000	2.749.800.000	2.749.800.000
Juli	458.300.000	3.208.100.000	3.208.100.000
Agustus	458.300.000	3.666.400.000	3.666.400.000
September	458.300.000	4.124.700.000	4.124.700.000
Oktober	458.300.000	4.583.000.000	4.583.000.000
November	458.300.000	5.041.300.000	5.041.300.000
Desember	458.300.000	5.499.600.000	5.499.600.000

Dari tabel tersebut, sebagai contoh pada bulan februari diperoleh perbandingan akumulasi realisasi anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi rencana penarikan dana (RPD) bulanan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{RA}_{\text{bulan Januari}} &= 458.300.000 \\
 \text{RA}_{\text{bulan Februari}} &= \\
 458.300.000 \text{ RPD}_{\text{bulan Januari}} &= \\
 458.300.000 \text{ RPD}_{\text{bulan Februari}} &= 458.300.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\sum_{j=1}^i \text{RA}_{\text{bulan ke } j}}{\sum_{j=1}^i \text{RPD}_{\text{bulan ke } j}} \times 100\% &= \frac{\text{RA}_{\text{Januari}} + \text{RA}_{\text{Februari}}}{\text{RPD}_{\text{Januari}} + \text{RPD}_{\text{Februari}}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 + 100.000.000}{800.000.000 + 800.000.000} \times 100\% = \frac{100.000.000}{1.600.000.000} \times 100\% = 6,25\%
 \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama diperoleh perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan untuk setiap bulan seperti pada tabel 26 sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan akumulasi RA bulanan dengan akumulasi RPD bulanan

Bulan	Penyerapan per Bulan
Januari	0.00%
Februari	6.25%
Maret	12.50%
April	15.63%
Mei	31.25%
Juni	37.50%

Bulan	Penyerapan per Bulan
Juli	37.50%
Agustus	62.50%
September	68.49%
Oktober	85.37%
November	87.91%
Desember	95.00%

Dari tabel di atas, dilanjutkan pengukuran konsistensi sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

$$\frac{0.00\% + 6.25\% + \dots + 95.00\%}{12} = \frac{539.90\%}{12} = 44.99\%$$

c. Pencapaian Keluaran

$$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \frac{\sum_{j=1}^m RKK \text{ i ke } j}{m} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- PK : Pencapaian keluaran
- RVK : Realisasi volume keluaran
- TVK : Target Volume keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran
- RKKi : Realisasi indikator kinerja keluaran ke i
- TKKi : Target indikator kinerja keluaran ke i
- m : Jumlah indikator keluaran

Tabel 19. Contoh Suatu eselon II memiliki tiga jenis keluaran dengan target dan realisasi

Keluaran	Volume		Indikator Kinerja Keluaran		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TKK)	Realisasi (RKK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	IKK ke 1	5	3
			IKK ke 2	10	7
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	IKK ke 1	3	3
			IKK ke 2	6	3
			IKK ke 3	5	5
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	IKK ke 1	4	2
			IKK ke 2	3	1

Pengukuran pencapaian keluaran diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$PK = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RVK_{ke\ i}}{TVK_{ke\ i}} \times \frac{\sum_{j=1}^m \frac{RKK_{i\ ke\ j}}{TKK_{i\ ke\ j}}}{m} \right) \times 100\%}{n}$$

$$= \frac{\left(\left(\frac{45}{50} \times \left(\frac{3}{5} + \frac{7}{10} \right) \right) + \left(\frac{3}{3} \times \left(\frac{3}{3} + \frac{3}{6} + \frac{5}{5} \right) \right) + \left(\frac{1}{1} \times \left(\frac{2}{4} + \frac{1}{3} \right) \right) \right) \times 100\%}{3} = 61.17\%$$

d. Efisiensi

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i}/RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i}/TVK_{ke\ i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- PK : Pencapaian keluaran
- RAK : Realisasi anggaran per keluaran
- PAK : Pagu anggaran per keluaran
- RVK : Realisasi volume keluaran
- TVK : Target Volume keluaran
- n : Jumlah jenis keluaran

Nilai Efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai efisiensi E
- :Efisiensi

Catatan: Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang di capai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%.

Tabel 20 Perbandingan target dan realisasi volume keluaran dan anggaran

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	50	45	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	3	3	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1	1	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RKA_{ke\ i}/RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i}/TVK_{ke\ i}}\right) \times 100\%}{n}$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{3.800.000.000/45}{4.000.000.000/50}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{975.000.000/3}{1.000.000.000/3}\right) \times 100\% + \left(1 - \frac{4.725.000.000/1}{5.000.000.000/1}\right) \times 100\%}{3}$$

$$= \frac{(-5.56\% + 2.50\% + 5.50\%)}{3} = 0.81\%$$

Nilai efisiensi dari suatu eselon I tersebut yaitu:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$= 50\% + \left(\frac{0.81\%}{20} \times 50\right) = 52.02\%$$

e. Pencapaian Hasil (Aspek Manfaat)

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}} \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

CH : Capaian Hasil

RKU : Realisasi indikator kinerja utama

TKU : Target indikator kinerja utama

n : Jumlah indikator kinerja utama

Contoh:

Suatu eselon II memiliki target hasil dari program sebagai berikut

IKU	Target	Realisasi
IKU ke 1	20%	14%
IKU ke 2	50%	40%

Dengan pencapaian hasil di atas diperoleh:

$$CH = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{RKU_{ke\ i}}{TKU_{ke\ i}} \times 100\%}{n}$$

$$CH = \frac{\left(\frac{14\%}{20\%} + \frac{40\%}{50\%}\right) \times 100\%}{2} = 75\%$$

D. PENILAIAN

Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan Program. Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi angka- angka hasil pengukuran menjadi sebuah informasi untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam melakukan penilaian didasarkan pada hasil pengukuran meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil.

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

Dengan

$$I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NK	: Nilai kinerja	WI	: Bobot aspek implementasi
I	: Nilai aspek implementasi	WP	: Bobot penyerapan anggaran
P	: Penyerapan anggaran	WK	: Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
K	: Konsistensi antara perencanaan dan implementasi	WPK	: Bobot pencapaian keluaran
PK	: Pencapaian keluaran	WE	: Bobot efisiensi
NE	: Nilai Efisiensi	WCH	: Bobot capaian hasil
CH	: Capaian hasil		

Selanjutnya setiap hasil pengukuran tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing aspek sebagai berikut:

a. Aspek implementasi (WI) : 33.3% terdiri atas

- 1) Penyerapan anggaran (WP) : 9.7%
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK): 18.2%
- 3) Pencapaian keluaran (WPK) : 43.5%
- 4) Efisiensi (WE) : 28.6%

b. Aspek manfaat : 66.7%

- 1) Pencapaian hasil (WCH) : 100%

Selanjutnya hasil perhitungan dari perkalian hasil pengukuran dan bobot menghasilkan nilai kinerja yang terbagi menjadi 5 tingkatan sebagai berikut:

- a. 100% - >90%: Sangat baik
- b. 90% - >80%: Baik
- c. 80% - >60%: Cukup
- d. 60% - >50%: Kurang
- e. ≤50% : Sangatkurang

Dari contoh sebelumnya, diperoleh nilai aspek implementasi sebagai berikut:

$$I = (I \times W_I) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

$$I = (95.00\% \times 9.7\%) + (44.99\% \times 18.2\%) + (96.67\% \times 43.5\%) + (52.02\% \times 28.6\%) = 74.33\%$$

Nilai kinerja yang dihasilkan dari eselon I tersebut sebesar 74.78%, maka nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L eselon I tersebut termasuk kategori cukup

E. ANALISIS

Analisis bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atas permasalahan atau hasil penilaian yang dilakukan. Analisis meliputi aspek Implementasi dan Manfaat serta Aspek Konteks dengan poin analisis sebagai berikut.”

Analisis Aspek Implementasi dan Manfaat

- a. Menjelaskan mengapa hasil pengukuran dan interpretasi menunjukkan tingkat tertentu;
- b. Menjelaskan keterbatasan yang dihadapi dalam menjelaskan setiap proses evaluasi;
- c. Membandingkan dan menjelaskan dengan hasil evaluasi periodesebelumnya;
- d. Melakukan identifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran dan hasil.

Analisis Aspek Konteks

- a. Melakukan identifikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan /atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan hasil yang ditargetkan;
- b. Melakukan analisis kesesuaian antara keluaran yang ditargetkan dengan capaian hasil;
- c. Melakukan analisis kesesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian keluaran;
- d. Melakukan analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran;

BABV
PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA

Laporan hasil evaluasi, batas waktu penyampaian laporan. Hasil evaluasi kinerja padadasarnyabersifattahunandandisampaikanpalinglambat1Aprilsetelahtahunyang dinilai. Laporan yang disusun disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa dengan format mengacu kepada lampiran Peraturan MenteriKeuangan

BAB VI
DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Penggunaan aplikasi monev kinerja penganggaran. Dalam rangka evaluasi kinerja penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran memfasilitasi kebutuhan sistem informasi berupa aplikasi Monev. Namun sehubungan dengan adanya Arsitektur dan Informasi Keuangan (ADIK), sistem hanya memfasilitasi sampai dengan tingkat output disesuaikan dengan keperluan Kementerian Keuangan, sehingga tidak dapat lebih detail. Oleh karena itu diperlukan mekanisme, sistem Monev yang dapat melihat sampai dengan tingkat di bawah output agar dapat lebih detail.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Kedisiplinan dan komitmen satker dalam melakukan pengisian realisasi dan capaian output dalam monitoring dan evaluasi sangat diperlukan karena data ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu indikator kinerja bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi ini sebaiknya juga disertai dengan pemberian penghargaan dan hukuman atas kedisiplinan dan komitmen untuk melakukan pelaporan data realisasi, capaian output dan indikator kinerja. Penghargaan dan hukuman tersebut dapat dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang di sepakati oleh kedua belah pihak penandatangan Perjanjian Kinerja.

BAB VII
PENUTUP

Ketentuan tindak lanjut yang akan diberlakukan mengenai masa transisi dan ketentuan teknis.

- a. Masa transisi: pengukuran pencapaian keluaran dan capaian hasil dilaksanakan paling lambat 2 tahun (masa transisi) setelah PMK 249 diundangkan. Masa transisi tersebut digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa tersebut, pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian setiap jenis keluaran pada setiap satuan kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran, dan bobot untuk aspek implementasi dan aspek manfaat selama 2 tahun tersebut menjadi 100% aspek implementasi dan 0% aspek manfaat
- b. Ketentuan teknis: ketentuan teknis diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

[PMK] Peraturan Menteri Keuangan. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Negara/Lembaga. Kementerian Keuangan Republik Indonesia